

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam KBBI¹ berasal dari sifat patuh atau ketaatan terhadap aturan. Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu ketaatan dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan maupun aturan perpajakan yang telah diwajibkan untuk dijalankan. Kepatuhan wajib pajak daerah adalah kepatuhan dari wajib pajak daerah dalam membayar pajak atas kepemilikan restoran yang ditunjukkan melalui sikap berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak daerah merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah yang sifatnya berdasarkan Undang-Undang memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan kemudian hasil dari pajak daerah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah yaitu pajak restoran yang termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).

Pajak yang dikenakan terhadap restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi

¹Endika, Della Sephira, *Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak UKM di Kota Jakarta Selatan)* 2023, hal.17

di tempat maupun ditempat lain. Namun, pengenaan pajak restoran tersebut hanya restoran yang per bulan dengan tarif pajak yang ditetapkan terhadap pajak restoran yaitu 10%. Adanya aturan terkait pajak daerah tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menyejahterakan daerahnya.

B. Pelayanan fiskus Pajak

Pelayanan fiskus adalah ²layanan dari petugas pajak yang diberikan kepada orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Bentuk dari layanan fiskus yaitu dalam hal membantu, mengurus atau menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Peran fiskus selama ini lebih dominan sebagai pemeriksa, sedangkan peran tersebut dibutuhkan lebih dari sekedar menjadi pemeriksa untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Petugas pajak yang memberikan layanan dengan baik kepada wajib pajak dari segi sikap, pengetahuan, dan keahlian serta mampu memberikan rasa puas bagi wajib pajak secara terus menerus dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pelayanan fiskus pajak terkait dengan makanan dan minuman mencakup berbagai aspek perpajakan yang berkaitan dengan industri

² Agus Nugroho Jatmiko, Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang),2006,hal.20

makanan dan minuman. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam hal ini termasuk pengenaan pajak terhadap penjualan makanan dan minuman, peraturan terkait pemungutan pajak dari restoran, kafe, atau tempat-tempat lain yang menyajikan makanan, serta regulasi terkait impor dan ekspor produk makanan yang bisa melibatkan tarif atau pajak lainnya.

Di banyak negara, industri makanan dan minuman sering kali memiliki aturan perpajakan khusus yang berbeda dengan sektor lainnya. Misalnya, beberapa negara mungkin memberlakukan tarif pajak khusus untuk minuman beralkohol atau makanan cepat saji sebagai upaya untuk mengatur konsumsi dan mendukung kesehatan masyarakat.

Pelayanan fiskus pajak dalam konteks makanan dan minuman juga mencakup penegakan aturan terkait pajak penjualan barang dan jasa (PPnBM), serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan standar perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, audit dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dalam sektor ini juga menjadi bagian penting dari pelayanan fiskus.

Pentingnya pelayanan fiskus pajak yang efektif dalam industri makanan dan minuman adalah untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kontribusi yang adil dan tepat dari sektor ini dapat diterima oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya.

C. Kebijakan Tarif Pajak

Tarif pajak adalah prosentase (%) atau³ jumlah (rupiah) yang telah ditetapkan sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, di mana besarnya tarif tersebut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya tarif pajak untuk pajak restoran yaitu 10%, di mana dasar pengenaan pajak restoran tersebut 19 yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran menjadi objek pajak restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Adanya penurunan tarif pajak restoran 100% dalam periode tertentu di beberapa kabupaten pada tahun 2020 dimasa pandemi, serta penghapusan atas sanksi denda akibat tunggakan pajak dimasa tertentu merupakan kebijakan tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan kondisi tertentu untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Pengertian Pajak Makanan Dan Minuman

Pajak makanan dan⁴ minuman adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada produk-produk makanan dan minuman tertentu. Tujuan dari pajak ini dapat bervariasi, antara lain untuk mengontrol konsumsi makanan atau minuman tertentu yang dianggap tidak sehat, untuk meningkatkan

³ Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Vol. 6 No. 2 2015, hal.3

⁴ Didi Handono Syahputra, Muhammad Rizky Putra, Agung Anantha, Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Vol.2, No.3 Juli 2024,hal.2

pendapatan negara, atau untuk tujuan lain yang relevan dengan kebijakan publik.

Pajak makanan dan minuman biasanya diterapkan dengan cara menambahkan biaya tambahan pada harga jual produk tersebut. Contoh produk yang sering kali dikenakan pajak ini adalah minuman beralkohol, minuman manis seperti soda atau minuman bersoda, serta makanan cepat saji yang dianggap memiliki nilai gizi rendah atau kandungan gula, garam, atau lemak tinggi.

Implementasi pajak makanan dan minuman bisa bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada kebijakan perpajakan dan tujuan sosial-ekonomi yang ingin dicapai. Beberapa negara mungkin memberlakukan pajak khusus untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman tertentu yang dianggap berpotensi menyebabkan masalah kesehatan masyarakat, sementara negara lain mungkin menggunakan pajak ini sebagai sumber pendapatan tambahan untuk proyek-proyek pembangunan atau sosial.

E. Unsur-Unsur Pajak Makanan Dan Makanan

Unsur-Unsur Pajak merupakan sebuah kewajiban yang berkaitan dengan dunia perpajakan. Tentu saja dalam penerapannya terdapat unsur-unsurnya sehingga bisa menyusun rencana perpajakan atau tax planning dengan mudah.

Unsur-unsur pajak yang berkaitan dengan restoran dan makanan dapat mencakup beberapa hal seperti berikut:

1. Pajak Penjualan

Pajak penjualan dikenakan pada penjualan makanan dan minuman di restoran, tergantung pada yurisdiksi tempat restoran tersebut beroperasi.

2. Pajak Layanan

Beberapa negara bagian atau yurisdiksi menerapkan pajak khusus untuk layanan yang diberikan di restoran, seperti layanan pelayanan atau pengiriman.

3. Pajak Penghasilan

Restoran harus melaporkan pendapatan mereka dan membayar pajak penghasilan berdasarkan laba yang mereka peroleh setelah pengurangan biaya operasional.

4. Pajak Properti

Jika restoran memiliki properti (misalnya, bangunan tempat usaha), mereka mungkin dikenakan pajak properti setiap tahun.

5. Pajak Tenaga Kerja

Beberapa yurisdiksi mungkin memerlukan pemotongan pajak penghasilan dari gaji karyawan restoran dan/atau kontribusi lain terkait tenaga kerja.

Jika Anda memiliki restoran atau terlibat dalam bisnis makanan, konsultasikan dengan seorang ahli pajak atau penasihat keuangan untuk memastikan kepatuhan yang tepat terhadap semua perPajak makanan dan

minuman memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks perekonomian suatu negara atau yurisdiksi.

F. Fungsi Pajak Makanan Dan Minuman

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak

Pajak makanan dan minuman memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks perekonomian suatu negara atau yurisdiksi:

1. Sumber Pendapatan Pemerintah

Pajak makanan dan minuman merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah, baik itu pemerintah lokal, regional, maupun nasional. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

2. Regulasi Konsumsi

Pajak makanan dan minuman dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur konsumsi masyarakat. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak lebih tinggi pada makanan atau minuman yang dianggap tidak sehat atau berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, seperti minuman beralkohol atau makanan cepat saji yang tinggi lemak atau gula.

3. Redistribusi Kekayaan

Pajak makanan dan minuman dapat berkontribusi pada upaya redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Pajak ini dapat diterapkan secara progresif, artinya tarif pajak lebih tinggi untuk produk-produk mewah atau mahal, sementara produk-produk dasar atau lebih murah dikenakan tarif pajak yang lebih rendah.

4. Pembiayaan Kebijakan Publik

Pemerintah dapat menggunakan pajak makanan dan minuman untuk mendukung kebijakan publik tertentu, seperti kampanye kesehatan masyarakat atau program-program perlindungan lingkungan.

5. Perlindungan Industri Lokal

Beberapa negara menerapkan pajak impor atau pajak khusus pada makanan dan minuman impor untuk melindungi produsen lokal dari persaingan harga luar negeri yang lebih murah.

6. Stabilisasi Ekonomi

Pajak makanan dan minuman juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk stabilisasi ekonomi dalam situasi tertentu, seperti dalam mengatasi defisit anggaran atau merespons kondisi ekonomi yang bergejolak.

Dalam praktiknya, fungsi-fungsi ini sering kali saling terkait dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan

kebijakan pajak makanan dan minuman untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan adil bagi masyarakat.

G. Jenis Pajak Makanan Dan Minuman

Jenis-jenis pajak yang biasanya dikenakan pada makanan dan minuman dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara bagian tertentu. Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umumnya terkait dengan makanan dan minuman:

1. **Pajak Penjualan**

Ini adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk makanan dan minuman yang dijual di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Pajak penjualan bisa dikenakan oleh pemerintah pusat atau daerah, dan tarifnya dapat bervariasi tergantung pada produk dan lokasi.

2. **Pajak Nilai Tambah (Value Added Tax/VAT)**

VAT adalah pajak yang dikenakan pada nilai tambah suatu barang atau jasa selama proses produksi atau distribusi. Makanan dan minuman yang dijual di supermarket atau minimarket, serta restoran, sering kali dikenakan VAT.

3. **Pajak Spesifik**

Pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan berdasarkan jumlah atau volume produk tertentu yang dibeli atau dijual. Contohnya adalah

pajak spesifik pada minuman beralkohol atau minuman manis tertentu yang berdasarkan kandungan gula atau alkoholnya.

4. Pajak Ekscise

Pajak ekscise adalah pajak khusus yang dikenakan pada produk-produk tertentu yang dianggap memiliki dampak negatif bagi masyarakat, seperti alkohol, rokok, atau makanan tertentu yang tinggi lemak atau gula.

5. Pajak Restoran

Beberapa yurisdiksi menerapkan pajak khusus yang hanya dikenakan pada layanan makanan dan minuman yang disajikan di tempat, seperti pajak makanan dan minuman di restoran atau kafe.

6. Pajak Transaksi Elektronik

Dalam beberapa kasus, terutama di era digital, pajak juga dapat dikenakan pada transaksi makanan dan minuman yang dilakukan melalui platform elektronik atau aplikasi pemesanan makanan online.

7. Pajak Properti

Restoran dan tempat makan sering kali juga dikenakan pajak properti atas bangunan atau lahan tempat usahanya beroperasi.

Setiap jenis pajak ini memiliki tujuan dan cakupan yang berbeda-beda, dan bisa saja diterapkan bersamaan tergantung pada regulasi lokal dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa sistem pajak

bisa sangat kompleks dan dapat berbeda-beda antar negara atau bahkan di dalam negara yang sama.

H. Syarat Pemungutan Pajak Makanan Dan Minuman

Syarat-syarat atau prinsip-prinsip⁵ umum yang biasanya menjadi dasar dalam penerapan pajak makanan dan minuman dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Tarif Pajak yang Jelas

Pemerintah harus menetapkan tarif pajak yang jelas dan transparan untuk makanan dan minuman yang dikenakan pajak. Tarif ini bisa berbeda-beda tergantung pada jenis produk, seperti makanan siap saji, minuman manis, atau alkohol.

2. Kesesuaian dengan Kebijakan Pemerintah

Pajak makanan dan minuman harus konsisten dengan tujuan dan kebijakan pemerintah, seperti tujuan kesehatan masyarakat, keadilan sosial, atau perlindungan lingkungan.

3. Keadilan dan Keterjangkauan

Penerapan pajak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen, khususnya untuk produk-produk konsumsi harian atau dasar yang penting bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan secara ekonomi.

⁵ Dewi Kusuma Wardani Ratri Purwaningrum, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak, 1 Februari 2018, Hal.4

4. Efisiensi Administratif

Sistem pajak harus efisien secara administratif, artinya penerapan, pengumpulan, dan pelaporan pajak harus mudah dilakukan baik bagi perusahaan maupun bagi otoritas pajak.

5. Elastisitas Pajak

Prinsip elastisitas pajak mengacu pada seberapa responsif konsumen terhadap perubahan harga akibat pajak. Produk yang lebih elastis terhadap pajak bisa mengalami penurunan konsumsi lebih besar jika pajak dinaikkan.

6. Keadilan Horizontal dan Vertikal

Pajak makanan dan minuman harus diterapkan secara adil baik secara horizontal (antara individu dengan tingkat penghasilan yang sama) maupun vertikal (antara individu dengan tingkat penghasilan yang berbeda)

7. Ketaatan dan Penegakan Hukum

Pemerintah harus memastikan adanya ketaatan yang baik terhadap aturan pajak ini dan memiliki sistem penegakan hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran atau penghindaran pajak.

Penerapan dan syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada negara atau yurisdiksi tertentu, dan perlu diperhatikan bahwa tujuan dan kebijakan pemerintah dalam menerapkan pajak makanan dan minuman juga dapat

berubah seiring waktu untuk mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi.

I. Subyek pajak dan wajib pajak Makanan Dan Minuman

1. Subjek Pajak:

1. Restoran dan Kafe

Tempat makan yang menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan di tempat.

2. Warung Makan

Usaha kecil yang menyediakan makanan untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang.

3. Catering

Pelayanan penyediaan makanan untuk acara khusus, seperti pesta atau pertemuan.

4. Kantin

Tempat yang menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan di suatu perusahaan atau institusi.

5. Pengelolaan Makanan

Usaha atau perusahaan yang memproduksi atau memasok makanan dan minuman untuk dijual di tempat lain, seperti pabrik makanan, distributor, atau grosir.

2. wajib pajak

1. Pemilik Usaha

Individu atau badan hukum yang memiliki dan mengoperasikan restoran, kafe, atau usaha makanan lainnya.

2. Pengusaha Katering

Individu atau badan hukum yang menyediakan jasa katering untuk acara-acara khusus.

3. Produsen atau Distributor Makanan

Perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan makanan dan minuman kepada pelanggan atau toko-toko ritel.

4. Karyawan dan Pekerja

Karyawan dan pekerja di industri makanan juga dapat menjadi subjek pajak tergantung pada kebijakan perpajakan setempat terkait pemotongan pajak penghasilan atau kontribusi sosial lainnya.

J. Objek Pajak Makanan Dan Minuman

Objek pajak dalam konteks⁶ restoran dan makanan merujuk pada barang atau kegiatan yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak terkait. Berikut adalah beberapa objek pajak yang umumnya terkait dengan industri restoran dan makanan:

⁶ Asep Muhammad Lutfi1) & Nardi Sunardi1), Pengaruh Current Ratio (Cr), Return On Equity (Roe), Dan Sales Growth Terhadap Harga Saham Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia), , Mei 2019, hal.1

1. Penjualan makanan dan minuman

penjualan makanan dan minuman di restoran atau tempat makan lainnya merupakan objek pajak utama. Pajak penjualan atau vat dapat dikenakan pada nilai transaksi penjualan ini.

2. Layanan makanan

layanan atau pelayanan yang diberikan oleh restoran atau kafe kepada pelanggan, seperti biaya pelayanan, bisa menjadi objek pajak terpisah tergantung pada regulasi setempat.

3. Produksi makanan

pabrik makanan atau produsen makanan lainnya dapat dikenakan pajak terkait dengan produksi dan distribusi makanan mereka.

4. Impor makanan dan minuman

impor makanan dan minuman dari luar negeri juga bisa menjadi objek pajak, seperti pajak bea masuk atau pajak impor khusus lainnya.

5. Pengadaan bahan baku

pembelian bahan baku atau bahan mentah untuk memproduksi makanan dan minuman juga dapat menjadi objek pajak, seperti pajak pembelian atau pajak nilai tambah pada bahan baku tertentu.

6. Pajak properti

properti yang digunakan untuk operasi restoran atau makanan, seperti bangunan tempat usaha atau lahan, juga dapat dikenakan pajak properti setiap tahun.

7. Pajak tenaga kerja

beberapa yurisdiksi mungkin menerapkan pajak terkait dengan upah atau gaji karyawan restoran, seperti pajak penghasilan atau kontribusi sosial.

8. Pajak layanan

layanan tambahan yang disediakan oleh restoran atau kafe, seperti pengiriman makanan atau pemesanan meja, bisa menjadi objek pajak layanan terpisah.

Setiap objek pajak ini dapat memiliki aturan dan tarif yang berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi atau negara bagian tempat operasi restoran tersebut berada. Penting untuk memahami dengan baik aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku serta berkonsultasi dengan ahli pajak untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

K. Asas Pemungutan Pajak Makanan dan Minuman

Asas pemungutan pajak dalam konteks ⁷restoran dan makanan mengacu pada prinsip-prinsip atau pedoman yang digunakan dalam menetapkan dan mengumpulkan pajak terkait dengan industri ini. Berikut adalah beberapa asas pemungutan pajak yang umumnya berlaku:

⁷ Giffiany Fibri Setiawati, Christina Retno Gayatrie, Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang, NOVEMBER 2018, hal.4

1. Asas Keadilan

Pajak harus dikenakan secara adil kepada semua subjek dan wajib pajak dalam industri makanan dan minuman. Prinsip ini mencakup keadilan horizontal (pajak yang sama untuk situasi yang sama) dan keadilan vertikal (pajak yang lebih tinggi untuk subjek dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi).

2. Asas Kepastian Hukum

Para wajib pajak harus mengetahui dengan pasti ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku bagi mereka, termasuk tarif pajak, jenis pajak yang dikenakan, dan prosedur administratif yang harus diikuti.

3. Asas Kesederhanaan

Sistem perpajakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh subjek dan wajib pajak. Hal ini mencakup formulasi tarif pajak yang jelas dan prosedur administratif yang sederhana.

4. Asas Efisiensi

Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien, baik dari segi biaya administratif maupun kepatuhan oleh subjek pajak. Administrasi perpajakan harus mampu mengumpulkan pajak dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang efisien.

5. Asas Kepentingan Umum

Pajak harus dikenakan untuk membiayai kebutuhan umum dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

6. Asas Kebijakan Pemerintah

Pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti untuk mendorong pola konsumsi yang sehat atau mendukung industri lokal.

7. Asas Keterbukaan dan Transparansi

Proses pemungutan pajak harus transparan dan terbuka untuk umum.

Informasi mengenai tarif pajak, penerimaan pajak, dan penggunaannya harus dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Penerapan asas-asas ini membantu memastikan bahwa sistem perpajakan dalam industri restoran dan makanan berjalan dengan efektif dan adil, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

L. Dasar Pengenaan Pajak Makanan Dan Minuman

Dasar pengenaan pajak merujuk pada hal atau objek yang menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada pemerintah. Dalam konteks restoran dan makanan, dasar pengenaan pajak bisa bervariasi tergantung pada jenis pajak yang diterapkan. Berikut adalah beberapa dasar pengenaan pajak yang umumnya digunakan:

1. Pajak Penjualan atau Pajak Nilai Tambah (VAT):

Dasar Pengenaan: Penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh restoran atau tempat makan lainnya kepada pelanggan. Cara Menghitung:

Tarif pajak dikenakan pada nilai transaksi penjualan, yang biasanya mencakup harga jual makanan dan minuman (termasuk pajak jika dikenakan) dan biaya pelayanan jika ada.

2. Pajak Spesifik atau Pajak Ekscise:

Dasar Pengenaan: Volume atau jumlah tertentu dari makanan atau minuman tertentu yang dijual atau dikonsumsi. Cara Menghitung: Pajak spesifik atau ekscise dikenakan per unit atau per satuan volume tertentu yang ditetapkan oleh regulasi perpajakan.

3. Pajak Properti:

Dasar Pengenaan: Nilai properti yang digunakan untuk operasional restoran, seperti bangunan tempat usaha atau lahan. Cara Menghitung: Pajak properti biasanya dihitung berdasarkan nilai properti yang ditetapkan oleh otoritas pajak setempat.

4. Pajak Layanan:

Dasar Pengenaan: Biaya untuk layanan tambahan yang disediakan oleh restoran atau pihak ketiga yang terkait dengan operasional makanan dan minuman (misalnya, biaya pengiriman atau biaya pemesanan meja). Cara Menghitung: Tarif pajak dikenakan pada jumlah biaya layanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Pajak Tenaga Kerja:

Dasar Pengenaan: Gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawan restoran. Cara Menghitung: Pajak tenaga kerja biasanya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diterima oleh karyawan,

dengan pemotongan langsung oleh pemberi kerja dan pembayaran kepada otoritas pajak.

Dasar pengenaan pajak ini sering kali disesuaikan dengan regulasi perpajakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat restoran tersebut beroperasi. Adalah penting untuk memahami secara jelas dasar pengenaan pajak yang berlaku untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan menghindari sanksi perpajakan yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kesalahan perhitungan.